



KONFLIK SOSIAL DALAM PENGELOLAAN WISATA HIU PAUS: STUDI KASUS DESA LABUHAN JAMBU KECAMATAN TARANO KABUPATEN SUMBAWA

Bintang Dwi Kayanti¹, Fahrunnisa²

bintangdwikayanti@gmail.com¹, fahrunnisa@uts.ac.id²

Universitas Teknologi Sumbawa

Abstrak

Perkembangan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Ka-bupaten Sumbawa telah menjadi salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya pesisir yang mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Kehadiran wisata tersebut mendorong perubahan mata pencaharian, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, serta berkembangnya berbagai usaha pendukung pariwisata. Na-mun, di balik manfaat tersebut muncul dinamika sosial berupa konflik yang dipicu oleh perbedaan akses terhadap pengelolaan, kewenangan dalam pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat ekonomi antarpihak yang terlibat. Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji wisata hiu paus dari aspek pengem-bangan destinasi, konservasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, se-dangkan kajian yang secara khusus membahas konflik sosial dalam pengelolaan wisata hiu paus masih relatif terbatas. Penelitian mengenai mekanisme akses dan kekuasaan dalam pengelolaan ekowisata bahari menjadi penelitian yang paling rel-evan karena sama-sama membahas relasi antaraktor dalam pengelolaan sumber daya wisata, meskipun belum menitikberatkan pada dinamika konflik sosial. Ber-dasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengisi kesenjangan ilmiah dengan mengkaji konflik sosial dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jam-bu menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf untuk menjelaskan relasi otoritas dan kepentingan antaraktor, serta konsep akses Ribot dan Peluso untuk menganalisis kemampuan aktor dalam memperoleh manfaat dari sumber daya wisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan doku-mentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial bermula dari perubahan sistem pengelolaan wisata yang sebelumnya berbasis masyarakat menjadi lebih formal setelah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditetapkan sebagai pengelola resmi kawasan wisata laut. Perubahan tersebut memunculkan perbedaan kepentingan mengenai kewenangan, akses pengelolaan, dan pembagian manfaat ekonomi di antara pemerintah desa, BLUD, lembaga konservasi, operator wisata, Pokdarwis, Pok-maswas, pemilik bagang, pemilik perahu, pelaku UMKM, dan masyarakat nelayan. Berdasarkan perspektif Dahrendorf, konflik berkembang karena distribusi otoritas yang tidak seimbang sehingga membentuk hubungan antara kelompok yang mem-iliki kewenangan dengan kelompok yang memiliki keterbatasan akses. Ketimpan-gan tersebut mendorong terbentuknya kelompok semu yang kemudian berkem-bang menjadi kelompok kepentingan dalam menyuarakan tuntutan terhadap sistem pengelolaan wisata. Sementara itu, konsep akses Ribot dan Peluso menunjukkan bahwa kemampuan memperoleh manfaat wisata tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan formal, tetapi juga oleh kekuasaan, jaringan sosial, serta akses ter-hadap kebijakan. Konflik memberikan dampak positif berupa peningkatan penda-patan masyarakat, terbukanya peluang usaha baru, serta meningkatnya penge-tahuan mengenai pariwisata dan konservasi hiu paus. Di sisi lain, konflik juga memunculkan kecemburuan sosial, rasa kecewa, dan ketidakpuasan akibat distri-busi manfaat yang belum merata. Dengan demikian, keberlanjutan wisata hiu paus memerlukan tata kelola yang lebih adil, transparan,

partisipatif, serta mampu memberikan ruang yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat dalam memperoleh manfaat dari aktivitas pariwisata.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Pengelolaan Wisata, Hiu Paus, Akses Manfaat.

Abstract

The development of whale shark tourism in Labuhan Jambu Village, Tarano District, Sumbawa Regency has become a form of coastal resource utilization that creates new economic opportunities for local communities. The presence of this tourism activity has encouraged changes in livelihoods, increased local economic activities, and stimulated the growth of various tourism-supporting businesses. However, alongside these benefits, social conflicts have emerged due to differences in access to tourism management, decision-making authority, and the distribution of economic benefits among stakeholders. Previous studies have primarily focused on whale shark tourism from the perspectives of destination development, conservation, and community welfare improvement. In contrast, studies specifically examining social conflict within whale shark tourism management remain limited. Research addressing access mechanisms and power relations in marine ecotourism management is considered the most relevant because it discusses interactions among stakeholders in managing tourism resources, although it does not specifically emphasize the dynamics of social conflict. This study therefore addresses this research gap by examining social conflict in the management of whale shark tourism in Labuhan Jambu Village through the perspective of Ralf Dahrendorf's Conflict Theory to explain authority relations and competing interests among actors, while Ribot and Peluso's Theory of Access is employed to analyze the unequal ability of actors to obtain benefits from tourism resources. This study adopted a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation, and were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that social conflict originated from the transformation of the tourism management system, which shifted from a community-based model to a more formal institutional arrangement following the appointment of the Regional Public Service Agency (BLUD) as the official manager of the marine tourism area. This transformation generated differences in interests regarding management authority, access to tourism governance, and the distribution of economic benefits among the village government, BLUD, conservation organizations, tourism operators, tourism awareness groups (Pokdarwis), community surveillance groups (Pokmaswas), bagang owners, boat owners, micro and small business actors, and local fishermen. From Dahrendorf's perspective, the conflict developed due to the unequal distribution of authority, creating relationships between dominant groups possessing decision-making power and subordinate groups with limited access. These inequalities encouraged the emergence of quasi groups that gradually evolved into interest groups demanding changes in the tourism management system. Furthermore, Ribot and Peluso's Theory of Access demonstrates that the ability to benefit from tourism resources is determined not only by formal ownership but also by power, social networks, and access to policy-making processes. The conflict has produced positive impacts, including increased community income, the creation of new business opportunities, and greater public awareness of tourism and whale shark conservation. Nevertheless, it has also generated social jealousy, disappointment, and dissatisfaction due to the unequal distribution of tourism benefits. Therefore, the sustainability of whale shark tourism requires a governance system that is more equitable, transparent, and participatory while ensuring equal opportunities for all community groups to access and benefit from tourism development.

Keywords: Social Conflict, Tourism Management, Whale Shark Tourism, Access To Resources.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena melibatkan berbagai dimensi, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Sektor pariwisata juga berperan penting dalam upaya peningkatan pendapatan Aprillianto et al, (2024). Oleh karena itu, dengan potensi alam dan budaya yang dimiliki Indonesia, pengembangan pariwisata perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip

kepariwisataan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Suranto (2021) menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus memberdayakan masyarakat lokal, mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, serta menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kelestarian lingkungan destinasi wisata. Dengan demikian adanya pariwisata yang berkelanjutan dapat dipastikan mampu memberdayakan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun budaya.

Wisata bahari merupakan salah satu sektor pariwisata andalan Indonesia dikarenakan sebagian besar wilayahnya adalah laut dengan panjang pantai hingga 99.083 km. Potensi wisata bahari yang sangat besar sehingga membutuhkan perencanaan yang cermat oleh daerah-daerah yang memiliki wilayah laut. Pengembangan wisata bahari tidak hanya berpotensi meningkatkan penghidupan masyarakat pesisir melalui potensi alam, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Jika ini dilakukan secara beruntun akan ada pengaruh dan perubahan mendasar pada kesadaran global tentang pengelolaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan sesuai dengan harapan forum Rio+20 Supriyanto, (2022). Melalui pengelolaan yang tepat, pariwisata diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan, serta menjaga keberlanjutan ekosistem laut Aerif Yahya, (2021). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wilayah pesisir yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata tidak selalu berjalan tanpa persoalan, menurut Pratiwi dkk. (2023) dalam (Baihaqi & Annida, 2024), perubahan nilai-nilai budaya, gaya hidup, dan potensi konflik sosial seringkali menjadi dampak negatif yang harus diwaspadai.

Konflik dalam pengelolaan pariwisata bahari dapat muncul akibat meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam pesisir seiring dengan berkembangnya aktivitas wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa pariwisata bahari tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam penelitian Fardian Jaka et al. (2021) di Kabupaten Badung Bali, yang menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata bahari memicu konflik antara pengembang pariwisata dan masyarakat lokal akibat berkurangnya ketersediaan air sebagai dampak pembangunan infrastruktur pariwisata. Pola konflik serupa juga berpotensi terjadi dalam pengelolaan wisata hiu paus, di mana kepentingan ekonomi pariwisata berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan. Hal demikian dapat memicu terjadinya konflik dalam sistem pengelolaan yang tidak adil dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Studi Eraku et al., (2023) yang dilakukan di Desa Batubarani, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa konflik juga mendorong perubahan struktur ekonomi masyarakat. Yang mana awalnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan beralih menjadi pemandu wisata hiu paus. Perubahan tersebut mengidentifikasi adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang memenuhi indikator lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Namun demikian, pergeseran peran dan kepentingan antar kelompok masyarakat tetap berpotensi menjadi sumber konflik apabila tidak diiringi dengan pengelolaan pariwisata yang adil dan berkelanjutan. Penelitian Gatra, (2024) menunjukkan bahwa ekowisata hiu paus di Indonesia memang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain berpotensi mengancam keberlanjutan hiu paus akibat meningkatnya stres, luka fisik, dan gangguan kesehatan akibat aktivitas wisata yang berlebihan. Dengan demikian, konflik dalam wisata hiu paus dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika konflik pariwisata bahari yang melibatkan perbedaan kepentingan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu wilayah

pesisir yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata bahari. Kekayaan ekosistem laut serta keindahan alam pesisir yang beragam menjadikan wilayah ini memiliki daya tarik wisata yang terus berkembang di tengah masyarakat. Salah satu bentuk wisata bahari yang menonjol adalah wisata hiu paus di Teluk Saleh, tepatnya di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano. Kehadiran wisata hiu paus ini menempatkan Sumbawa sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki destinasi wisata berbasis konservasi hiu paus. Secara ekologis, kawasan Teluk Saleh merupakan habitat yang ideal bagi hiu paus karena perairannya kaya akan sumber makanan berupa plankton. Hal ini dibuktikan dalam Penelitian Widiawati et al. (2025) menunjukkan bahwa hiu paus cenderung menetap di perairan Teluk Saleh karena kondisi lingkungan yang mendukung keberlangsungan hidupnya. Hiu Paus sendiri merupakan spesies ikan terbesar di dunia yang bersifat jinak dan dikenal sebagai pemakan plankton dengan cara menyaring air saat makan, sehingga keberadaannya memiliki daya tarik tersendiri bagi aktivitas wisata bahari.

Seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap wisata hiu paus, destinasi ini mulai dikenal hingga di tingkat nasional. Perkembangan wisata tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat otonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal. Dalam konteks pembangunan desa, pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola sumber daya dan pembangunan secara mandiri. Penelitian Januarti, (2022) menjelaskan bahwa kebijakan otonomi desa bertujuan mendorong transformasi desa melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, demokratisasi desa, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu dipandang sebagai peluang strategis untuk mendukung pembangunan desa berbasis potensi lokal.

Wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu kini menjadi salah satu ikon wisata bahari di Kabupaten Sumbawa. Daya tarik utama destinasi ini terletak pada keberadaan hiu paus sebagai spesies yang dilindungi dan tidak berbahaya bagi manusia, sehingga menarik minat wisatawan. Pada fase awal kemunculannya, sebagian nelayan memandang kehadiran hiu paus sebagai gangguan terhadap aktivitas penangkapan ikan. Namun, seiring meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap potensi ekonomi pariwisata, pandangan tersebut mulai mengalami perubahan. Sumber daya alam yang sebelumnya dianggap menghambat mata pencaharian kini mulai dipersepsikan sebagai peluang ekonomi baru melalui aktivitas wisata. Perubahan ini menunjukkan adanya dinamika sosial dalam masyarakat pesisir yang beradaptasi terhadap transformasi ekonomi lokal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hariyadi et al. (2024) yang menyatakan bahwa *community-based tourism* (CBT) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan wisata.

Di balik perkembangan pariwisata hiu paus yang pesat, muncul pula dampak sosial yang tidak dapat diabaikan. Tidak seluruh masyarakat merasakan manfaat ekonomi dari keberadaan wisata tersebut secara merata. Sebagian warga justru menolak pengembangan wisata karena merasa tidak memperoleh keuntungan langsung dan bahkan menganggapnya merugikan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial di antara masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah, tetapi memiliki akses yang berbeda terhadap pemanfaatan wisata. Perbedaan akses tersebut memicu ketegangan sosial yang berkembang menjadi konflik antar kelompok masyarakat di Desa Labuhan Jambu. Fenomena serupa ditemukan dalam penelitian Ristiawan dan Tiberghien (2021) di Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa praktik CBT menghadapi

tantangan berupa ketimpangan distribusi manfaat ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, konflik yang muncul di Labuhan Jambu mencerminkan dinamika sosial masyarakat pesisir yang dihadapkan pada perbedaan kepentingan terhadap pemanfaatan sumber daya.

Sejauh ini penelitian mengenai pariwisata hiu paus di wilayah Sumbawa, terkhususnya di Desa Labuhan Jambu, umumnya berfokus pada potensi ekonomi dan perubahan perilaku sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Wijayanti (2024) dan Sri Nurhidayati (2022) yang menekankan aspek pengembangan pariwisata serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, kajian yang secara khusus membahas konflik sosial akibat perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat masih relatif terbatas. Dalam penelitian ini ada dua kesenjangan yang diangkat yaitu kesenjangan empiris berupa data yang berasal dari hasil observasi dan kesenjangan ilmiah berupa adanya fenomena yang belum banyak diteliti sebelumnya Aini, (2024). Secara empiris, kondisi di lapangan telah memunculkan konflik yang nyata antara kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda dalam pengelolaan dan pemanfaatan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu. Sementara itu, secara ilmiah masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji konflik sosial tersebut dalam konteks pariwisata hiu paus di tingkat Desa. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menelaah dinamika konflik sosial yang muncul akibat berkembangnya wisata hiu paus. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada (1) Konteks lokal Desa Labuhan Jambu, (2) Fokus terhadap konflik sosial pada wisata hiu paus berbasis konservasi, (3) Analisis relasi kuasa dan akses manfaat antara aktor.

Keberadaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga memunculkan dinamika sosial yang cukup kompleks di antara berbagai aktor yang terlibat, seperti pemerintah desa, kelompok pengelola wisata, dan masyarakat lokal, khususnya nelayan. Perkembangan pariwisata ini pada satu sisi membuka kesempatan ekonomi baru melalui aktivitas wisata, namun pada sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial akibat perbedaan akses terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wisata tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Apabila tidak dikelola secara adil dan partisipatif, aktivitas pariwisata justru dapat memperbesar ketimpangan sosial di tingkat lokal, terutama antara kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap pengelolaan wisata dan kelompok masyarakat yang berada di luar struktur tersebut.

Situasi tersebut kemudian memunculkan perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial. Perbedaan kepentingan ini berkaitan dengan persoalan kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta pembagian manfaat yang dihasilkan dari kegiatan wisata hiu paus. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana struktur wewenang dalam pengelolaan wisata terbentuk, bagaimana perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat muncul, serta bagaimana dinamika konflik sosial berkembang di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada konflik sosial yang muncul akibat perbedaan akses, kewenangan, dan distribusi manfaat dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika konflik tersebut sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan tata kelola pariwisata hiu paus yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

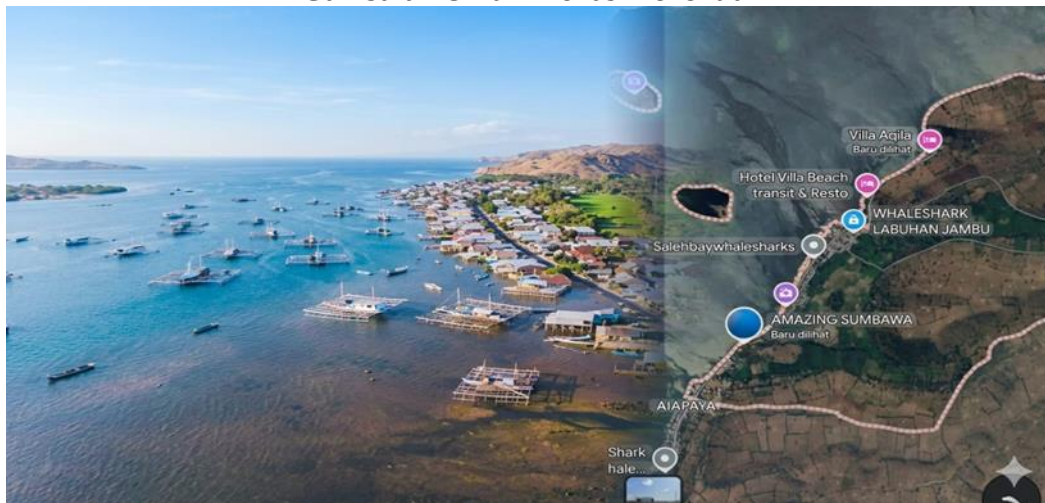
Sesuai dengan judul yang penulis ajukan, maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana proses penelitian berlandaskan pada pemahaman dan pemaknaan suatu fenomena sosial dan masalah yang terjadi pada masyarakat. Menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami kasus tertentu baik individu, kelompok atau organisasi dan menggunakan wawancara, observasi serta dokumen sebagai sumber data. Berlandaskan pada paradigma konstruktivis untuk memahami bagaimana fenomena sosial yang terjadi di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa Besar. Menurut Sugiyono (2023:16) “Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolah), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.”

Menurut Creswell (2020:60), penelitian kualitatif dilakukan dalam lingkungan alamiah, yaitu situasi nyata tempat para partisipan mengalami langsung fenomena yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak menempatkan partisipan dalam situasi buatan seperti di laboratorium dan tidak hanya menggunakan instrumen tertulis sebagaimana dalam penelitian survei. Sebaliknya, data diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan partisipan di lapangan, misalnya dengan melakukan percakapan, pengamatan, serta melihat secara langsung bagaimana individu bertindak dan berperilaku dalam lingkungan sosial mereka. Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data di Desa Labuhan Jambu sebagai lokasi penelitian. Peneliti akan mendatangi aktor-aktor yang terlibat dalam sistem pengelolaan wisata hiu paus, dalam hal ini ada pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat lokal khususnya nelayan. Peneliti akan mewawancarai para aktor-aktor yang terlibat secara langsung mengenai sistem pengelolaan wisata hiu paus yang menjadi sumber cikal bakal konflik dalam penelitian yang diteliti.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Creswell, (2020) “Studi kasus merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan untuk menelaah suatu kasus secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami suatu fenomena secara lebih rinci dengan melihat kondisi, aktor, serta dinamika sosial yang terjadi dalam suatu setting tertentu.” Pemilihan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu konflik sosial dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa. Konflik yang terjadi tidak dapat dipahami secara terpisah dari kondisi sosial masyarakat setempat, karena konflik tersebut berkaitan dengan perbedaan kepentingan antaraktor serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan wisata. Selain itu, konflik yang muncul dalam pengelolaan wisata hiu paus juga melibatkan beberapa aktor yang memiliki peran dan kepentingan yang berbeda, seperti pemerintah desa, kelompok pengelola wisata, serta masyarakat lokal yang terlibat maupun yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan pariwisata. Perbedaan posisi dan kepentingan tersebut kemudian memunculkan dinamika hubungan sosial yang perlu dipahami secara lebih mendalam. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini berupaya memahami secara lebih mendalam bagaimana proses terjadinya konflik dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, siapa saja aktor yang terlibat dalam konflik tersebut, serta bagaimana konflik tersebut memengaruhi hubungan sosial di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 1 Peta Topografi Pesona Desa Labuhan Jambu

Sumber: https://maps.app.goo.gl/Zic3RmNWVzK4oJNJ6?g_st=aw

Desa Labuhan Jambu adalah salah satu Desa dari 8 (Delapan) Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Tarano dan terletak di wilayah Pesisir dengan mata pencaharian Masyarakat rata-rata Nelayan / Perikanan, dan pertanian, Desa Labuhan Jambu sendiri sudah terbentuk sejak tahun 1945. Dalam rentang perjalanan kepemimpinan di Desa Labuhan Jambu, maka saat ini sejak tahun 2022-2030 Desa Labuhan Jambu dipimpin oleh Bapak SUHARDI. Desa Labuhan Jambu memiliki 15 (lima belas) Rukun Tetangga (RT) dan 6 (enam) Rukun Warga (RW) dengan Luas Wilayah Desa Labuhan Jambu sebesar 32.33 Ha, dengan jumlah penduduk 3.686 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1724 jiwa, perempuan 1962 Jiwa. Untuk kepala keluarga sendiri adalah 938 kepala keluarga yang terdiri atas 827 laki-laki dan 111 perempuan.

Tabel 1 Data Jumlah Penduduk Desa Labuhan Jambu

No	Nama Komponen	Angka
1	Jumlah Laki-Laki	1.724 Orang
2	Jumlah Perempuan	1.963 Orang
3	Jumlah Total	3.687 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	938 KK
5	Kepadatan Penduduk	0,8 per Km

Sumber: *Profil Desa Labuhan Jambu 2025*

Tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Berdasarkan data Profil Desa Labuhan Jambu Tahun 2025, tingkat pendidikan masyarakat di desa ini tergolong cukup beragam, mulai dari masyarakat yang belum menempuh pendidikan formal hingga masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Data menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang tamat pendidikan dasar dan menengah masih mendominasi. Jumlah penduduk yang tamat SD/ sederajat serta SMA/ sederajat tergolong cukup tinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap pendidikan formal meskipun tingkat pendidikan yang ditempuh masih didominasi pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 2 Data Jenjang Pendidikan Penduduk Desa Labuhan Jambu

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 Tahun yang Belum TK	43 Orang	56 Orang
Usia 3-6 Tahun yang Sedang TK/Play Group	112 Orang	150 Orang
Usia 7-18 Tahun yang Tidak Pernah Sekolah	81 Orang	79 Orang
Usia 7-18 Tahun yang Sedang Sekolah	242 Orang	237 Orang
Usia 18-56 Tahun yang Pernah Sekolah	Orang	Orang
Usia 18-56 Tahun Pernah SD Tapi Tidak Tamat	265 Orang	90 Orang
Tamat SD/Sederajat	300 Orang	500 Orang
Jumlah Usia 12-56 Tahun Tidak Tamat SLTP	Orang	Orang
Jumlah Usia 18-56 Tahun Tidak Tamat SLTA	Orang	Orang
Tamat SMP /Sederajat	200 Orang	200 Orang
Tamat SMA/Sederajat	127 Orang	350 Orang
Tamat D-1/Sederajat	Orang	Orang
Tamat D-2/Sederajat	Orang	Orang
Tamat D-3/Sederajat	Orang	1 Orang
Tamat S-1/Sederajat	345 Orang	300 Orang
Tamat S-2/Sederajat	3 Orang	2 Orang
Tamat S-3/Sederajat	2 Orang	2 Orang
Tamat SLB A	Orang	Orang
Tamat SLB B	Orang	Orang
Tamat SLB C	Orang	Orang
Jumlah	1.720 Orang	1.967Orang
Jumlah Total	3.687Orang	

Sumber: Profil Desa Labuhan Jambu 2025

Mata pencaharian masyarakat merupakan gambaran dari kondisi ekonomi dan potensi utama yang dimiliki suatu desa. Berdasarkan data Profil Desa Labuhan Jambu Tahun 2025, sebagian besar masyarakat Desa Labuhan Jambu bekerja pada sektor perikanan dan pertanian. Jumlah masyarakat yang bekerja sebagai nelayan menjadi yang paling dominan dibandingkan jenis pekerjaan lainnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak geografis desa yang berada di wilayah pesisir sehingga masyarakat sangat bergantung pada sumber daya laut sebagai sumber penghasilan utama.

Tabel 3 Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Labuhan Jambu

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	392Orang	100 Orang
Buruh Tani	Orang	Orang
Buruh Migran Perempuan	Orang	Orang
Buruh Migran Laki-Laki	Orang	Orang
Pegawai Negeri Sipil	30Orang	26Orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga	Orang	Orang
Pedagang Keliling	10 Orang	100Orang
Peternak	100 Orang	Orang
Nelayan	476Orang	Orang
Montir	4 Orang	Orang
Dokter Swasta	Orang	Orang
Bidan Swasta	Orang	5 Orang
Perawat Swasta	2Orang	7 Orang

Pembantu Rumah Tangga	Orang	Orang
Tni	Orang	Orang
Polri	1Orang	Orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3 Orang	1 Orang
Pengusaha Kecil Dan Menengah	207 Orang	32 Orang
Pengacara	Orang	Orang
Notaries	Orang	Orang
Dukun Kampung Terlatih	Orang	Orang
Jasa Pengobatan Alternatif	1Orang	Orang
Dosen Swasta	1Orang	Orang
Pengusaha Besar	6 Orang	Orang
Arsitektur	4 Orang	Orang
Seniman/Artis	Orang	Orang
Karyawan Perusahaan Swasta	7 Orang	2 Orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	Orang	Orang
Mengurus Rumah Tangga	Orang	786 Orang
Belum Bekerja	822 Orang	500 Orang
Non Pegawai Negeri Sipil	31 Orang	31 Orang
Jumlah Total Penduduk	3.687 Orang	

Sumber: Profil Desa Labuhan Jambu 2025

Secara geografis wilayah Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano terletak di bagian Barat wilayah kecamatan Tarano dengan batas-batas wilayah: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labuhan Pidang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Labuhan Aji. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut (Teluk Saleh). Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bantulente dan Desa Banda. Dengan Luas Wilayah Desa Labuhan Jambu mempunyai luas: 3.233 Ha.

Tabel 4 Data Geografis Desa Labuhan Jambu

No	Komponen	Angka (Ha)
1	Luas Wilayah Desa Labuhan Jambu	3,233 Ha
	1. Wilayah Penggunaan	599,7 Ha
	2. Tanah Sawah	125 Ha
	3. Tanah Kering	777 Ha
	4. Tanah Basah	3 Ha
	5. Tanah Perkebunan	88 Ha
	6. Tanah Fasilitas Umum	254,3 Ha
	7. Tanah Hutan	452,8 Ha
2	Iklim	
	1. Suhu Rata-Rata Harian	34 °C
	2. Tinggi Tempat dari Permukaan Laut	725 Mdl
3	Orbitrasi	
	1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	5 Km
	2. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten / Kota	94 Km
	3. Jarak ke Ibu Kota Provinsi	254 Km

Sumber: Profil Desa Labuhan Jambu 2025

Penelitian ini berfokus pada konflik sosial yang muncul dalam sistem pengelolaan Wisata Hiu Paus di Desa Labuhan Jambu. Setiap tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat pasti mengalami suatu konflik sosial, seperti yang dikatakan oleh Dahrendorf bahwa konflik sosial itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Desa Labuhan Jambu memiliki potensi wisata yang sangat besar, namun di balik potensi dan manfaat yang

sangat besar bagi masyarakat justru bisa menimbulkan suatu konflik sosial. Konflik sosial tersebut muncul dikarenakan tidak meratanya manfaat yang dirasakan oleh sebagian masyarakat yang dianggap karena masih belum teraturnya sistem tata kelola yang ada.

Latar Belakang Konflik dalam Pengelolaan Wisata Hiu Paus

Konflik dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui serangkaian proses yang berlangsung sejak awal pengembangan wisata. Perubahan fungsi hiu paus dari objek yang sebelumnya dianggap mengganggu aktivitas nelayan menjadi daya tarik wisata, diikuti dengan berkembangnya aktivitas pariwisata, perubahan struktur pengelolaan, serta pembagian kewenangan antaraktor, turut membentuk dinamika baru dalam hubungan sosial masyarakat. Seiring dengan meningkatnya nilai ekonomi wisata hiu paus, muncul berbagai kepentingan yang memengaruhi pola pengelolaan dan distribusi otoritas, sehingga menjadi latar belakang munculnya konflik di antara aktor-aktor yang terlibat. Oleh karena itu, untuk memahami akar konflik tersebut, bagian ini menguraikan perkembangan wisata hiu paus, proses pembentukan struktur pengelolaan, serta kronologi perkembangan wisata hingga terjadinya eskalasi konflik sosial di Desa Labuhan Jambu.

Perkembangan Pariwisata Hiu Paus

Munculnya wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Konservasi Indonesia atau Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) yang resmi di umumkan pada tahun 2017 mengenai keberadaan agregasi hiu paus di kawasan Teluk Saleh. Berdasarkan hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa kawasan Teluk Saleh memiliki potensi wisata yang cukup besar karena keberadaan hiu paus yang sering muncul di sekitar bagang nelayan. Temuan tersebut kemudian disampaikan kepada Pemerintah Desa Labuhan Jambu dan masyarakat setempat sebagai upaya untuk mengembangkan wisata berbasis masyarakat yang tetap memperhatikan aspek konservasi.

Hasil penelitian tersebut menjadi titik awal berkembangnya wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu. Pengembangan wisata dilakukan melalui kerja sama antara lembaga konservasi, pemerintah desa, dan masyarakat lokal yang melihat keberadaan hiu paus tidak hanya sebagai bagian dari upaya konservasi, tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterlibatan berbagai pihak pada tahap awal menunjukkan bahwa pengembangan wisata hiu paus sejak awal dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Sebelum berkembang menjadi objek wisata, keberadaan hiu paus sebenarnya telah lama dikenal oleh masyarakat nelayan di Teluk Saleh. Menurut masyarakat, hiu paus telah muncul di kawasan tersebut sejak puluhan tahun lalu, masyarakat mengenal hiu paus dulunya dengan sebutan pekek torok. Namun pada masa itu hiu paus lebih atau pekek torok ini lebih sering dianggap sebagai gangguan bagi aktivitas penangkapan ikan karena sering masuk ke area bagang dan merusak jaring nelayan ketika mencari makan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memandang hiu paus sebagai hama yang merugikan nelayan.

Pandangan masyarakat terhadap hiu paus mulai berubah setelah adanya penelitian dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga konservasi. Masyarakat kemudian mulai memahami bahwa keberadaan hiu paus memiliki nilai konservasi sekaligus potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Perubahan cara pandang tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk mulai terlibat dalam pengembangan wisata hiu paus. Seiring dengan berkembangnya wisata hiu paus, mulai berdatangan wisatawan yang dibawa oleh agen perjalanan wisata dari luar daerah. Pada tahap awal, kegiatan wisata masih dilakukan secara sederhana dengan memanfaatkan perahu nelayan untuk mengantar wisatawan menuju lokasi kemunculan hiu paus. Selain itu, promosi wisata mulai dilakukan secara bertahap sehingga wisata hiu paus semakin dikenal oleh wisatawan

domestik maupun mancanegara.

Perkembangan wisata hiu paus kemudian membawa perubahan bagi masyarakat Desa Labuhan Jambu. Sebelum adanya wisata hiu paus, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidup pada sektor perikanan sebagai nelayan dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu. Setelah wisata berkembang, mulai muncul berbagai peluang ekonomi baru yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan wisata. Namun demikian, beberapa masyarakat juga menilai bahwa perkembangan pariwisata membawa perubahan sosial dan budaya akibat meningkatnya interaksi dengan wisatawan dari luar daerah.

Pada tahap awal perkembangan wisata hiu paus, pengelolaan wisata masih dilakukan secara sederhana dan belum memiliki struktur pengelola yang bersifat formal. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan wisata dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pihak konservasi. Dalam proses tersebut mulai ditentukan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata, seperti operator wisata, pengelola perahu, dan masyarakat yang berperan dalam promosi wisata. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejak awal telah terbentuk pembagian kewenangan dalam pengelolaan wisata, meskipun masih bersifat sederhana dan berbasis kesepakatan bersama. Keberadaan berbagai pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan wisata secara tidak langsung mulai membentuk struktur otoritas dalam kegiatan wisata hiu paus. Pada tahap ini hubungan antaraktor masih berjalan relatif harmonis karena tujuan utama yang ingin dicapai adalah mengembangkan wisata sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Namun demikian, pembagian kewenangan dan peran yang mulai terbentuk tersebut menjadi dasar munculnya dinamika pengelolaan wisata pada periode-periode berikutnya.

Jika ditinjau menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf, kondisi tersebut menunjukkan mulai terbentuknya struktur otoritas dalam pengelolaan wisata hiu paus. Dahrendorf menjelaskan bahwa otoritas tidak dipahami sebagai kekuasaan yang dimiliki secara pribadi, tetapi merupakan unsur yang melekat dalam setiap organisasi sosial dan menjadi dasar terbentuknya hubungan kekuasaan di antara individu maupun kelompok Susilo (2021). Pada fase awal pengembangan wisata hiu paus, otoritas belum terpusat pada satu pihak tertentu, melainkan masih tersebar di antara lembaga konservasi, pemerintah desa, dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wisata. Meskipun pada tahap ini belum terlihat konflik yang terbuka, pembagian kewenangan yang mulai terbentuk tersebut menjadi fondasi bagi munculnya perbedaan kepentingan dan perebutan pengaruh dalam pengelolaan wisata hiu paus pada tahap selanjutnya.

Pembentukan Struktur Pengelolaan Wisata Sebagai Awal Mula Konflik Otoritas

Pada awal kemunculan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, pengelolaan wisata masih bersifat sederhana dan berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, belum terdapat lembaga resmi yang secara khusus bertanggung jawab mengatur seluruh aktivitas wisata. Pengelolaan dilakukan melalui kerja sama antara masyarakat lokal, Pemerintah Desa Labuhan Jambu, Pokdarwis, Pokmaswas, dan Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) sebagai lembaga pendamping. Dalam kondisi tersebut, kewenangan pengelolaan wisata masih berada pada tingkat lokal dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama melalui musyawarah desa. Beberapa masyarakat menjelaskan bahwa pada masa awal pengembangan wisata, masyarakat menjadi aktor utama dalam menjalankan kegiatan wisata. Pokdarwis berperan dalam mendukung aktivitas kepariwisataan, sementara Pokmaswas membantu pengawasan kawasan laut. Pemerintah desa berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi kegiatan masyarakat dan mendukung pengembangan wisata, sedangkan YKI berperan sebagai pendamping yang memberikan edukasi, sosialisasi, dan arahan mengenai pengelolaan wisata berbasis konservasi.

Dalam proses pengelolaannya, masyarakat yang terlibat diberikan peran yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Sebagian masyarakat terlibat sebagai penyedia transportasi laut menggunakan perahu nelayan, sebagian lainnya berperan sebagai pemandu wisata (guide), operator wisata, pengawas kawasan laut, maupun penyedia fasilitas pendukung wisata. Selain itu terdapat pula masyarakat yang memperoleh manfaat ekonomi melalui kegiatan perdagangan dan penyediaan jasa lainnya di kawasan wisata. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata hiu paus juga berlangsung dalam waktu yang berbeda-beda. Beberapa masyarakat mengaku telah terlibat sejak awal pengembangan wisata sekitar tahun 2015 hingga 2018, sedangkan sebagian lainnya baru mulai terlibat beberapa tahun kemudian. Perbedaan waktu keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa distribusi peran dalam pengelolaan wisata terus berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

Pada tahap awal pengembangan wisata, perahu-perahu nelayan lokal masih digunakan untuk mengangkut wisatawan menuju lokasi kemunculan hiu paus. Kapal yang digunakan saat itu umumnya berkapasitas antara lima hingga tujuh orang. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi nelayan lokal untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan wisata sekaligus memperoleh tambahan pendapatan di luar aktivitas penangkapan ikan.

Seiring meningkatnya jumlah wisatawan dan berkembangnya aktivitas wisata, terjadi perubahan dalam sistem pengelolaan transportasi laut. Kapal-kapal yang digunakan tidak lagi hanya mengandalkan perahu nelayan berukuran kecil, tetapi mulai beralih menggunakan kapal yang memiliki kapasitas lebih besar, yaitu sekitar dua puluh orang. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kebutuhan operasional wisata yang semakin berkembang. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa pada masa awal pengelolaan wisata, pembagian peran dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa dan diperkuat melalui keputusan kepala desa. Dalam proses tersebut mulai ditentukan pihak-pihak yang bertugas sebagai operator wisata, pengelola transportasi laut, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan promosi wisata. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa sejak awal telah terdapat proses distribusi kewenangan dalam pengelolaan wisata hiu paus meskipun masih dilakukan secara sederhana dan berbasis masyarakat.

Perkembangan wisata hiu paus sempat mengalami hambatan ketika pandemi Covid-19 melanda. Meskipun wisata hiu paus mulai diperkenalkan secara resmi pada tahun 2018, aktivitas wisata tidak dapat berkembang secara optimal karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat dan penurunan jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan wisata sempat terhenti selama beberapa tahun.

Setelah pandemi mereda, jumlah wisatawan mulai meningkat dan aktivitas wisata kembali berjalan secara normal. Peningkatan jumlah kunjungan tersebut mendorong terjadinya perubahan dalam struktur pengelolaan wisata. Pengelolaan yang sebelumnya lebih banyak dilakukan oleh masyarakat kemudian mulai melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan formal dari pemerintah. Perubahan tersebut ditandai dengan hadirnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada tahun 2025 sebagai pengelola resmi kawasan wisata hiu paus. Kehadiran BLUD dilakukan karena kawasan Teluk Saleh berada dalam wilayah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, pengelolaan kawasan laut tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kewenangan masyarakat dan pemerintah desa, tetapi mulai melibatkan pemerintah provinsi melalui BLUD.

Dalam pelaksanaannya, BLUD memiliki kewenangan untuk mengatur administrasi wisatawan, pengawasan aktivitas wisata di laut, penataan kawasan wisata, serta melakukan

koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Sementara itu, pemerintah desa tetap berperan dalam pengelolaan fasilitas darat seperti dermaga, kebersihan lingkungan, dan fasilitas pendukung lainnya. Di sisi lain, YKI tetap berperan sebagai lembaga pendamping yang memberikan edukasi dan pendampingan konservasi kepada masyarakat. Meskipun telah terdapat struktur pengelolaan yang lebih formal, hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas wisata di lapangan masih banyak dijalankan oleh operator wisata. Operator memiliki peran penting dalam mengatur kedatangan wisatawan, menjalin kerja sama dengan agen perjalanan, menghubungkan wisatawan dengan pemandu wisata, serta mengatur pelaksanaan kegiatan wisata di lapangan. Selain itu, terdapat pula koordinator operator yang berfungsi sebagai penghubung antaroperator dalam menjalankan aktivitas wisata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur pengelolaan wisata hiu paus berkembang melalui perpaduan antara kewenangan formal dan kewenangan informal. Di satu sisi terdapat BLUD yang memiliki kewenangan resmi berdasarkan aturan pemerintah, sementara di sisi lain terdapat operator wisata yang memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan kegiatan wisata sehari-hari. Akibatnya, distribusi otoritas dalam pengelolaan wisata tidak hanya berada pada satu lembaga, tetapi tersebar di antara berbagai aktor yang terlibat dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

Jika ditinjau menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf, perkembangan pengelolaan wisata hiu paus menunjukkan adanya perubahan struktur otoritas dari sistem yang semula berbasis masyarakat menuju sistem yang lebih formal dan terorganisasi. Dahrendorf menjelaskan bahwa otoritas merupakan posisi yang melekat dalam suatu struktur sosial dan memberikan hak kepada pihak tertentu untuk mengatur, mengarahkan, serta membuat keputusan Susilo (2021). Dalam konteks wisata hiu paus, otoritas pada awalnya berada pada masyarakat lokal, pemerintah desa, dan lembaga konservasi yang bersama-sama mengembangkan wisata. Namun seiring berkembangnya wisata dan meningkatnya nilai ekonomi yang dihasilkan, muncul lembaga-lembaga baru yang memperoleh kewenangan formal maupun informal dalam pengelolaan wisata. Perubahan distribusi otoritas tersebut kemudian membentuk struktur pengelolaan yang semakin kompleks dan menjadi dasar bagi munculnya dinamika sosial dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

Kronologi Perkembangan Wisata dan Eskalasi Konflik Sosial

Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang peneliti lakukan dengan masyarakat asli Desa Labuhan Jambu, baik dari kalangan yang terlibat langsung dalam aktivitas wisata maupun kelompok nelayan setempat, sejarah mengenai dinamika tempat wisata ini tidak ditemukan dalam bentuk dokumen tertulis resmi di desa. Oleh karena itu, peneliti menyusun alur kronologis ini dengan merajut kembali ingatan kolektif dan penuturan lisan dari para informan yang menyaksikan langsung bagaimana wisata ini lahir. Konflik dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui serangkaian peristiwa yang berlangsung sejak awal kemunculan wisata hingga berkembangnya sistem pengelolaan yang lebih formal. Pada tahap awal, hubungan antaraktor masih berjalan relatif harmonis karena seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan potensi wisata hiu paus sebagai sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Namun, seiring meningkatnya aktivitas wisata, bertambahnya jumlah wisatawan, serta perubahan struktur pengelolaan dan distribusi kewenangan, mulai muncul perbedaan kepentingan di antara aktor-aktor yang terlibat. Perbedaan tersebut kemudian memengaruhi pola hubungan antaraktor dan berkembang menjadi konflik yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran mengenai proses muncul dan berkembangnya konflik dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, peneliti menyusun kronologi perkembangan wisata dan dinamika konflik sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Kronologi Perkembangan Wisata dan Eskalasi Konflik Sosial

Tahun/Priode	Pristiwa/Pase Perkembangan Wisata	Status/Dinamika Konflik
Tahun 1994-1996	Hiu paus sendiri sudah ada di kawasan laut Desa Labuhan Jambu tepatnya di wilayah Teluk Saleh, dari tahun 94-96. Pada awal kemunculannya masyarakat menganggap hiu paus tersebut sebagai hama, hal ini dikarenakan kemunculannya di sekitar bagang nelayan dapat mengganggu aktifitas melaut nelayan.	Pada priode ini konflik sosial belum terjadi.
Tahun 2015-2016	Pada priode ini potensi wisata hiu paus mulai ada dan tamu pun mulai ada sedikit demi sedikit, kapal nelayan pun mulai di gunakan 1-3 dalam sehari. Hal tersebut dikarenakan adanya penelitian dari NGO Konservasi Insdonesia mengenai hiu paus di kawasan Teluk Saleh. Pada priode ini sistem pengelolaan wisata masih berbasis masyarakat.	Pada priode ini konflik sosial mubelum muncul, kapal-kapal nelayan kecil seperti nelayan pancing masih digunakan dan masih berjalan sistem tata kelola wisata yang berbasis masyarakat.
Tahun 2017-2018	Memasuki priode ini hasil penelitian dari NGO Konservasi Indonesia mengenai agregari hiu paus di kawasan Teluk Saleh, menyatakan bahwa adanya potensi atraksi wisata dan konservasi bagi hiu paus yang ada di kawasan Teluk Saleh. Hingga pada akhir tahun 2018 wisata hiu paus resmi dibuka, promosi mulai dilakukan dan tamu mulai berdatangan.	Pada priode ini konflik sosial mulai terlihat, mulai adanya konflik antara beberapa kelompok dengan nelayan salah satunya nelayan pancing. Pihak nelayan mengatakan sejak tahun 2017 samapai sekarang kapal mereka sudah tidak tidugakan lagu untuk membawa tamu dengan alasan kecil dan tidak sesuai kriteria. Hal tersebut kemudia yang memunculkan konflik antara nelayan dengan pengurus wisata yang saat itu adalah operator wisata.
Tahun 2019-2021	Pada priode ini perkembanga wisata hiu paus tidak berjalan dengan lancar, pada awal wisata di buka akhir tahun 2018 tidak lama setelah itu terjadilah wabah Covid-19. Hal ini menyebabkan pemberhentian sementara pada ktivitas wisata.	Pada proide ini hubungan masyarakat khususnya nelayan/nelayan pancing dengan pengurus wisata masih baik selama tidak membahas mengenai wisata.

Tahun 2022-2023	Memasuki priode ini, aktivitas wisata mulai di buka kembali dengan lancar, tamu wisatawan yang data juga mulai mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.	Pada priode ini konflik sosioal pun semakin terlihat, beberapa kelompok masyarakat yang tidak hanya nelayan/nelayan pancing saja akan tetapi penolokan juga muncul dari pemilik bagang, yang tidak setuju dengan harga yang ditentkan, dan tokoh agama yang menganggap masuknya wisata dapat merusak norma lewat cara berpakaian dan kebiasaan wisatawan mancanegara. Pada priode ini tiga kelompok inilah yang kontra terhadap adanya wisata hiu paus di Labuhan Jambu.
Tahun 2024-2025	Pada priode ini, mulai masuknya BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Provinsi yang secara langsung menjadi pengelola di kawasan laut Desa Labuhan Jambu terkhususnya di kawasab Teluk Saleh. Adapun BLUD dalam pengelolaan wisata ini bertugas untuk mengawasi jalannya wisata, bertanggung jawab akan tiket masuk dan aturan lainnya mengenai wisata hiu paus, sehingga pada priode ini sistem pengelolaan mulai berkembang dari berbasis masyarakat menjadi lebih formal.	Pada priode ini konflik sosial semakin bertambah dengan hadirnya BLUD sebagai pengelola resmi dari provinsi. Dari priode ini mulai muncul konflik berupa penyegehan kantor BLUD karena adanya kesalah pahaman atau propaganda yang dilalukan oleh pengepul ikan desa lain yang mengatakan bahwa Konservasi itu tidak menguntungkan masyarakat. kemudian muncul konflik antara pemerintah desa dengan sebagian masyarakat, dimana pemerintah desa dianggap tiba bisa menyelesaikan masalah antara nelayan lokal dengan nelayan luar desa.
Tahun 2025-Sekarang	Pada priode ini, perkembangan wisata hiu paus semakin meningkat dan jumlah tamu wisatawan baik dari negara maupun mancanegara terus meningkat.	Pada priode ini konflik sosial tetap ada dalam masyarakat, hubungan antara nelayan/nelayan pancing dengan Operator wisata, pemerintah desa serta BLUD tidak baik-baik saja mengenai wisata yang berlangsung saat ini terutama mengenai pembagian manfaat, keterlibatan dan sistem tata kelola wisata yang dianggap belum jelas. bahkan salah satu nelayan pancing mengatakan bahwa mereka mempunyai kelompok penyerang apabila suatu saat itu dibutuhkan.

Sumber: Dimodifikasi oleh Peneliti

Aktor-aktor yang Berkepentingan dalam Konflik

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu

melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Namun tidak seluruh aktor memiliki kedudukan yang sama dalam struktur pengelolaan wisata. Sebagian aktor memiliki kewenangan dan otoritas dalam menetapkan kebijakan, mengatur pelaksanaan, serta mengawasi pengelolaan wisata, sedangkan sebagian lainnya hanya berperan sebagai pelaksana atau pihak yang terdampak oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Perbedaan kedudukan tersebut menunjukkan adanya pembagian aktor ke dalam dua kelompok, yaitu aktor yang memiliki otoritas dalam pengelolaan wisata dan aktor yang tidak memiliki otoritas. Adapun aktor-aktor beserta kepentingannya dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Aktor dan Kepentingannya dalam Pengelolaan Wisata

No.	Aktor	Kepentingan
1	Pemerintah Desa	Mempertahankan kewenangan dalam pengelolaan wilayah desa, mengelola fasilitas darat (dermaga, taman, kebersihan), serta menjembatani kepentingan masyarakat dengan BLUD.
2	BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)	Mengelola kawasan wisata hiu paus, mengatur sistem tiket, pengawasan kawasan laut, sosialisasi aturan, dan penataan aktivitas wisata sesuai kebijakan pemerintah.
3	Lembaga Konservasi (NGO)	Mendorong pelestarian hiu paus melalui penelitian, edukasi masyarakat, pendampingan, serta penerapan wisata berbasis konservasi.
4	Operator Wisata	Memperoleh pendapatan dari jasa wisata dengan membawa wisatawan, mengatur perjalanan, dan mengelola aktivitas wisata di lapangan.
5	Pemilik Perahu	Memperoleh keuntungan ekonomi melalui penyewaan perahu sebagai sarana transportasi wisatawan.
6	Nelayan Bagang	Mempertahankan aktivitas bagang sebagai lokasi munculnya hiu paus sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan wisata hiu paus.
7	Nelayan Pancing	Mempertahankan akses terhadap wilayah penangkapan ikan agar aktivitas mencari nafkah tidak terganggu oleh kegiatan wisata.
8	Pokdarwis	Mengembangkan pariwisata desa, meningkatkan kualitas pelayanan wisata, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan wisata.
9	Pokmaswas	Menjaga kelestarian kawasan laut melalui pengawasan dan patroli terhadap aktivitas yang melanggar aturan.
10	Masyarakat UMKM	Memperoleh manfaat ekonomi melalui penjualan makanan, minuman, dan produk lainnya kepada wisatawan.

Sumber: Dimodifikasi oleh Peneliti

Posisi Aktor dalam Konflik

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu melibatkan berbagai aktor dengan peran yang berbeda, keterlibatan tersebut tidak diikuti dengan distribusi kewenangan, akses, dan manfaat yang diterima secara merata. Sebagian aktor memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan dan mengatur jalannya pengelolaan wisata, sedangkan sebagian lainnya hanya berada pada posisi menjalankan serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, kondisi tersebut menunjukkan adanya pembagian posisi aktor ke dalam kelompok superordinat sebagai pihak yang memiliki otoritas dan kelompok subordinat sebagai pihak yang berada pada posisi mengikuti kebijakan dalam struktur pengelolaan wisata hiu paus.

1. Superordinat

Dalam teori konflik Ralf Dahrendorf, kelompok superordinat merupakan kelompok yang memiliki otoritas untuk mengatur, membuat kebijakan, serta mengendalikan jalannya suatu sistem sosial Susilo (2021). Posisi superordinat tidak ditentukan oleh individu secara pribadi, melainkan melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimiliki dalam suatu struktur sosial. Dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, terdapat beberapa aktor yang menempati posisi superordinat karena memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengaturan aktivitas wisata. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, aktor yang memiliki posisi superordinat dalam pengelolaan wisata hiu paus meliputi Pemerintah Desa, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta operator wisata. Ketiga aktor tersebut memiliki peran yang berbeda, namun sama-sama mempunyai pengaruh dalam menentukan arah pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

Pemerintah Desa memiliki posisi penting sebagai otoritas lokal yang memiliki kewenangan terhadap wilayah administratif Desa Labuhan Jambu. Dalam pengelolaan wisata hiu paus, pemerintah desa berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak pengelola wisata lainnya. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam pengelolaan fasilitas pendukung wisata di darat seperti dermaga, taman wisata, kebersihan lingkungan, serta penyelesaian berbagai persoalan sosial yang muncul di masyarakat. Pada masa awal pengembangan wisata hiu paus, pemerintah desa turut terlibat dalam penyusunan aturan pengelolaan melalui musyawarah desa dan keputusan kepala desa yang mengatur mekanisme pelaksanaan wisata. Posisi superordinat juga dimiliki oleh BLUD sebagai lembaga resmi yang memperoleh kewenangan dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengelola kawasan laut Teluk Saleh. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, BLUD bertugas mengatur administrasi wisatawan, sistem tiket, pengawasan aktivitas wisata di laut, sosialisasi aturan wisata, serta koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata hiu paus. Kehadiran BLUD menunjukkan adanya pergeseran sistem pengelolaan dari yang sebelumnya lebih berbasis masyarakat menuju pengelolaan yang lebih formal melalui lembaga pemerintah.

Selain Pemerintah Desa dan BLUD, operator wisata juga menempati posisi yang cukup kuat dalam struktur pengelolaan wisata hiu paus. Meskipun tidak memiliki kewenangan formal seperti pemerintah desa maupun BLUD, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa operator wisata memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan aktivitas wisata di lapangan. Operator wisata berperan dalam menerima pemesanan wisatawan, mengatur perjalanan wisata, menentukan penggunaan kapal dan bagang, menghubungkan wisatawan dengan berbagai fasilitas wisata, serta berkoordinasi dengan pelaku wisata lainnya. Beberapa masyarakat bahkan menjelaskan bahwa dalam praktik sehari-hari, operator wisata menjadi pihak yang paling menentukan jalannya aktivitas wisata karena memiliki jaringan yang luas dengan guide, hotel, agen perjalanan, dan wisatawan dari berbagai daerah. Selain ketiga aktor tersebut, lembaga konservasi atau NGO juga memiliki pengaruh dalam pengelolaan wisata hiu paus, terutama pada aspek konservasi dan pendampingan masyarakat. Lembaga konservasi berperan dalam penelitian hiu paus, edukasi masyarakat, pendampingan pengelolaan wisata berbasis konservasi, serta sosialisasi mengenai perlindungan hiu paus dan ekosistem laut. Meskipun tidak memiliki kewenangan formal dalam pengambilan keputusan operasional wisata, keberadaan NGO memberikan kontribusi penting dalam pembentukan dan pengembangan wisata hiu paus sejak awal kemunculannya.

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat dipahami bahwa posisi superordinat dalam pengelolaan wisata hiu paus tidak hanya ditempati oleh satu aktor, tetapi melibatkan beberapa pihak yang memiliki tingkat kewenangan dan pengaruh yang berbeda-beda.

Pemerintah Desa dan BLUD memiliki otoritas formal yang bersumber dari struktur pemerintahan, sedangkan operator wisata memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik operasional wisata di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi otoritas dalam pengelolaan wisata hiu paus berlangsung melalui hubungan antaraktor yang saling berkaitan dalam menentukan arah pengelolaan wisata di Desa Labuhan Jambu.

Kepentingan objektif menurut Dahrendorf, merupakan kepentingan yang secara struktural melekat pada posisi seseorang atau kelompok dalam suatu sistem sosial Susilo (2021). Kepentingan tersebut muncul karena peran dan kedudukan yang dimiliki dalam struktur sosial, terlepas dari apakah individu atau kelompok tersebut telah menyadarinya atau belum. Dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, setiap aktor memiliki kepentingan objektif yang berbeda sesuai dengan posisi dan perannya masing-masing dalam sistem pengelolaan wisata. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, Pemerintah Desa memiliki kepentingan objektif untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat serta memastikan pengelolaan wisata dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Labuhan Jambu. Sebagai pemegang otoritas di tingkat desa, pemerintah desa berkepentingan untuk menjaga hubungan antara masyarakat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata, sekaligus mendorong agar wisata hiu paus dapat menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain pemerintah desa, BLUD sebagai lembaga pengelola kawasan laut memiliki kepentingan objektif untuk menjalankan tugas pengelolaan wisata sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Kepentingan tersebut meliputi pengaturan aktivitas wisata, pengawasan kawasan laut, pelaksanaan administrasi wisata, serta menjaga keberlanjutan kawasan wisata hiu paus di Teluk Saleh. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab formal terhadap kawasan laut, BLUD berkepentingan untuk memastikan aktivitas wisata berjalan sesuai aturan dan prinsip pengelolaan yang telah ditetapkan. Lembaga konservasi atau NGO juga memiliki kepentingan objektif yang berbeda dibandingkan aktor lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, lembaga konservasi sejak awal berperan dalam penelitian hiu paus, pendampingan masyarakat, serta edukasi mengenai konservasi laut. Oleh karena itu, kepentingan objektif yang dimiliki lembaga konservasi adalah menjaga kelestarian hiu paus dan ekosistem laut agar tetap terpelihara seiring dengan berkembangnya aktivitas wisata.

Di tingkat masyarakat, operator wisata memiliki kepentingan objektif untuk menjaga keberlangsungan kegiatan wisata karena aktivitas tersebut menjadi sumber utama pendapatan dan mata pencaharian mereka. Operator wisata berkepentingan untuk memperoleh wisatawan, mengelola perjalanan wisata, serta memastikan kegiatan wisata dapat terus berjalan sehingga memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku wisata yang terlibat. Sementara itu, pemilik bagang memiliki kepentingan objektif untuk memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan hiu paus yang muncul di sekitar bagang mereka. Bagang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penangkapan ikan, tetapi juga menjadi lokasi utama aktivitas wisata hiu paus. Oleh karena itu, pemilik bagang berkepentingan agar bagang mereka tetap digunakan dalam kegiatan wisata sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan selain dari hasil perikanan.

Kepentingan objektif juga dimiliki oleh pemilik perahu yang terlibat dalam transportasi wisata. Sebagai penyedia jasa transportasi laut, mereka berkepentingan untuk memperoleh kesempatan membawa wisatawan menuju lokasi kemunculan hiu paus. Semakin banyak wisatawan yang menggunakan jasa perahu mereka, maka semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat diperoleh. Selain itu, kelompok masyarakat lain seperti Pokdarwis, Pokmaswas, pelaku UMKM, dan masyarakat lokal juga memiliki kepentingan objektif yang berkaitan dengan keberlangsungan wisata hiu paus. Pokdarwis

berkepentingan terhadap pengembangan kegiatan pariwisata dan pelayanan wisatawan, sedangkan Pokmaswas berkepentingan terhadap pengawasan kawasan laut dan perlindungan sumber daya pesisir. Sementara itu, pelaku UMKM dan masyarakat lokal berkepentingan untuk memperoleh peluang ekonomi melalui kegiatan perdagangan, penyediaan jasa, maupun aktivitas ekonomi lainnya yang muncul akibat perkembangan wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun seluruh aktor sama-sama terlibat dalam ruang wisata hiu paus, masing-masing memiliki kepentingan objektif yang berbeda sesuai posisi dan peran yang mereka jalankan. Perbedaan kepentingan tersebut merupakan konsekuensi dari struktur pengelolaan wisata yang melibatkan berbagai aktor dengan fungsi yang berbeda-beda. Dalam perspektif Dahrendorf, perbedaan kepentingan objektif ini menjadi dasar munculnya potensi konflik karena setiap aktor berupaya mempertahankan kepentingan yang melekat pada posisi mereka dalam sistem pengelolaan wisata hiu paus.

2. Subordinat

Dalam teori konflik Ralf Dahrendorf, kelompok subordinat merupakan kelompok yang berada pada posisi mengikuti aturan dan keputusan yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas Susilo (2021). Kelompok ini memiliki keterbatasan dalam menentukan kebijakan maupun mengakses proses pengambilan keputusan, sehingga cenderung menjadi pihak yang menerima dampak dari kebijakan yang dibuat oleh kelompok superordinat. Dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, posisi subordinat umumnya ditempati oleh masyarakat lokal yang tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan wisata, khususnya nelayan pemancing, sebagian pemilik perahu, pemilik bagang tertentu, pelaku UMKM, serta masyarakat yang tidak terlibat dalam struktur pengelolaan wisata.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tidak seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam aktivitas wisata hiu paus. Pada masa awal perkembangan wisata, beberapa nelayan lokal sempat dilibatkan untuk mengangkut wisatawan menggunakan perahu nelayan yang mereka miliki. Namun seiring berkembangnya wisata, sistem pengelolaan mengalami perubahan dan penggunaan perahu nelayan kecil mulai dibatasi karena dianggap tidak memenuhi standar operasional.

Selain nelayan pemancing dan pemilik perahu, posisi subordinat juga terlihat pada sebagian masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan wisata. Salah satu masyarakat menjelaskan bahwa keterlibatan nelayan hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat sebelum akhirnya mereka tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan wisata.

Perubahan tersebut menyebabkan sebagian nelayan berada pada posisi yang hanya mengikuti kebijakan yang telah ditentukan oleh pengelola wisata tanpa memiliki ruang yang cukup untuk mempengaruhi keputusan tersebut. Beberapa nelayan bahkan berupaya memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan membuat atau membeli perahu yang lebih besar, namun tetap belum memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas wisata.

Masyarakat kelompok ini pada dasarnya memiliki kepentingan untuk memperoleh manfaat dari keberadaan wisata hiu paus, namun keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan relatif terbatas. Mereka lebih banyak menjadi pihak yang mengikuti aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pengelola wisata maupun lembaga yang memiliki kewenangan. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa belum memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan wisata. Salah satu masyarakat menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat masih belum merata dan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam struktur pengelolaan wisata hiu paus terdapat kelompok masyarakat yang memiliki posisi relatif lebih lemah dalam distribusi

otoritas. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk menentukan aturan maupun kebijakan wisata, tetapi tetap terdampak oleh keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas. Dalam perspektif Dahrendorf, kondisi tersebut menggambarkan keberadaan kelompok subordinat yang secara struktural berada pada posisi mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh kelompok superordinat dalam sistem pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

Kepentingan subjektif menurut Dahrendorf, muncul ketika individu atau kelompok mulai menyadari posisi dan kepentingannya dalam suatu struktur sosial Susilo (2021). Kesadaran tersebut mendorong mereka untuk menilai, mempertanyakan, bahkan menuntut perubahan terhadap kondisi yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Dalam konteks pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, kepentingan subjektif terlihat dari munculnya kesadaran sebagian masyarakat, khususnya nelayan dan kelompok yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan wisata, terhadap ketimpangan akses, keterlibatan, dan distribusi manfaat wisata. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, sebagian masyarakat mulai menyadari bahwa mereka berada pada posisi yang kurang diuntungkan dalam sistem pengelolaan wisata hiu paus. Kesadaran tersebut muncul karena mereka merasa tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat dalam aktivitas wisata maupun menikmati manfaat ekonomi yang dihasilkan. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan rasa kecewa, ketidakpuasan, dan kecurigaan terhadap pihak-pihak yang dianggap lebih dominan dalam pengelolaan wisata.

Salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa hubungan mereka dengan pemerintah desa menjadi kurang harmonis karena masyarakat merasa aspirasinya tidak didengarkan secara serius. Menurut masyarakat tersebut, masyarakat bukan menolak kebijakan yang dibuat pemerintah desa, tetapi menginginkan adanya kejelasan serta ruang dialog yang lebih terbuka terkait pengelolaan wisata hiu paus.

Kesadaran yang sama juga terlihat dalam pandangan masyarakat terhadap operator wisata. Sebagian masyarakat menilai bahwa operator wisata memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam menentukan jalannya wisata sehingga manfaat ekonomi lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi tersebut memunculkan persepsi adanya ketidakadilan dalam pengelolaan wisata hiu paus.

Selain terhadap operator wisata, kepentingan subjektif masyarakat juga terlihat dari munculnya berbagai pertanyaan mengenai keberadaan dan fungsi BLUD sebagai pengelola resmi kawasan wisata. Sebagian masyarakat menilai bahwa kehadiran BLUD belum memberikan dampak yang jelas terhadap pengelolaan wisata maupun kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, muncul keraguan dan ketidakpercayaan terhadap peran BLUD dalam sistem pengelolaan wisata hiu paus.

Temuan penelitian lapangan juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap ketimpangan manfaat wisata semakin menguat ketika mereka membandingkan kondisi ekonomi kelompok yang terlibat langsung dalam wisata dengan masyarakat yang tidak memperoleh akses yang sama. Sebagian masyarakat menilai bahwa keuntungan wisata lebih banyak dinikmati oleh operator wisata, pemilik bagang tertentu, dan pelaku wisata yang memiliki akses langsung terhadap wisatawan. Sementara itu, masyarakat lain hanya menjadi penonton tanpa memperoleh manfaat yang berarti dari keberadaan wisata hiu paus. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kecemburuan sosial dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Bahkan terdapat masyarakat yang secara terbuka menyatakan bahwa tidak semua warga mendukung keberadaan wisata hiu paus karena manfaat yang dirasakan dianggap belum merata.

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa kepentingan yang sebelumnya bersifat objektif mulai berkembang menjadi kepentingan subjektif ketika masyarakat

menyadari adanya ketimpangan dalam akses, keterlibatan, dan distribusi manfaat wisata. Kesadaran tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk kritik, keluhan, pertanyaan terhadap kebijakan pengelola, serta tuntutan akan pengelolaan wisata yang lebih adil. Dalam perspektif Dahrendorf, kondisi ini menunjukkan bahwa potensi konflik yang sebelumnya masih bersifat laten mulai berkembang menjadi kesadaran kolektif di kalangan masyarakat. Kesadaran inilah yang selanjutnya menjadi dasar terbentuknya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama dalam memperjuangkan hak dan kepentingannya dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

Implikasi Konflik Terhadap Kondisi Sosial

Konflik dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dan otoritas antaraktor, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi terhadap kondisi sosial masyarakat. Perbedaan posisi, akses, dan distribusi manfaat dalam pengelolaan wisata memengaruhi hubungan sosial antaraktor serta mendorong munculnya berbagai dinamika di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, implikasi tersebut terlihat dari terbentuknya kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, ketimpangan distribusi manfaat, berkembangnya harapan masyarakat terhadap perbaikan tata kelola wisata, serta meningkatnya penyampaian keluhan sebagai respons terhadap pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

Terbentuknya Kelompok Semu

Menurut Dahrendorf, kelompok semu (quasi group) merupakan sekumpulan individu yang berada dalam posisi sosial yang relatif sama sehingga memiliki kepentingan yang sama, namun belum memiliki kesadaran kolektif yang terorganisasi dalam suatu kelompok formal Susilo (2021). Kelompok ini muncul sebagai akibat dari distribusi otoritas yang tidak merata dalam suatu struktur sosial. Meskipun memiliki kepentingan yang sama, anggota kelompok semu masih menyampaikan ketidakpuasan secara individu atau melalui interaksi sehari-hari sehingga konflik yang muncul masih bersifat laten. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terbentuknya kelompok semu dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu terlihat pada sebagian masyarakat, terutama nelayan pemancing dan pemilik perahu yang tidak lagi dilibatkan dalam aktivitas wisata. Kelompok ini memiliki pengalaman yang relatif sama, yaitu merasa tidak memperoleh kesempatan yang setara untuk terlibat dalam kegiatan wisata meskipun wisata tersebut berkembang di wilayah tempat mereka tinggal.

Pada awal perkembangan wisata hiu paus, sebagian nelayan lokal sempat dilibatkan dalam kegiatan pengangkutan wisatawan menggunakan perahu nelayan. Namun, seiring berkembangnya wisata dan perubahan sistem pengelolaan, keterlibatan mereka mulai berkurang hingga akhirnya tidak lagi digunakan dalam aktivitas wisata. Kondisi tersebut dialami oleh banyak nelayan sehingga memunculkan kesamaan kepentingan dan pengalaman di antara mereka.

Kesamaan pengalaman juga terlihat dari adanya nelayan yang berusaha menyesuaikan diri dengan ketentuan wisata dengan membuat atau membeli perahu yang lebih besar agar dapat kembali dilibatkan. Namun, upaya tersebut tidak selalu memberikan hasil yang sesuai dengan harapan mereka. Akibatnya, muncul rasa kecewa yang dirasakan oleh beberapa nelayan yang berada dalam kondisi serupa.

Selain nelayan pemancing, kelompok semu juga terlihat pada sebagian masyarakat yang merasa belum memperoleh manfaat langsung dari keberadaan wisata hiu paus. Meskipun tidak seluruhnya menolak wisata, mereka memiliki pandangan yang sama bahwa manfaat wisata masih lebih banyak dirasakan oleh kelompok tertentu yang terlibat langsung dalam pengelolaan wisata. Kesamaan persepsi tersebut menunjukkan adanya kepentingan

yang sama di antara mereka untuk memperoleh akses dan manfaat yang lebih merata.

Meskipun berbagai keluhan dan ketidakpuasan mulai muncul, pada tahap ini masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama belum membentuk organisasi atau kelompok khusus untuk memperjuangkan tuntutan mereka. Keluhan yang disampaikan masih dilakukan secara individu, melalui percakapan sehari-hari, forum musyawarah desa, maupun rapat yang melibatkan masyarakat dan pihak pengelola wisata. Dengan kata lain, masyarakat yang merasa kurang diuntungkan masih berada pada tahap kesadaran awal terhadap kepentingan mereka. Temuan penelitian lapangan juga menunjukkan bahwa ketidakpuasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan dalam wisata, tetapi juga menyangkut pembagian manfaat yang dianggap belum merata. Sebagian masyarakat mulai membandingkan kondisi mereka dengan kelompok yang memperoleh keuntungan lebih besar dari wisata, seperti operator wisata dan pemilik bagang tertentu. Perbandingan tersebut kemudian memperkuat kesamaan kepentingan di antara masyarakat yang merasa belum memperoleh manfaat yang setara.

Dalam perspektif Dahrendorf, kondisi tersebut menunjukkan terbentuknya kelompok semu (*quasi group*), yaitu kelompok masyarakat yang secara struktural memiliki kepentingan yang sama akibat posisi mereka dalam sistem pengelolaan wisata, tetapi belum terorganisasi secara formal untuk memperjuangkan kepentingan tersebut. Kelompok ini menjadi dasar munculnya konflik karena di dalamnya telah terbentuk kesadaran bersama mengenai adanya ketimpangan akses dan manfaat wisata. Kesadaran tersebut selanjutnya berpotensi berkembang menjadi kelompok kepentingan (*interest group*) ketika masyarakat mulai terorganisasi dan secara kolektif memperjuangkan kepentingan yang mereka anggap belum terpenuhi.

Terbentuknya Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Menurut Dahrendorf, kelompok kepentingan (*interest group*) merupakan kelompok yang terbentuk ketika anggota kelompok semu mulai menyadari kepentingan yang mereka miliki secara bersama dan kemudian berupaya memperjuangkannya melalui tindakan kolektif Susilo (2021). Berbeda dengan kelompok semu yang masih bersifat laten dan tidak terorganisasi, kelompok kepentingan telah menunjukkan adanya kesadaran bersama, tuntutan yang lebih jelas, serta upaya untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan yang dianggap merugikan kelompok mereka. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kelompok kepentingan dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu mulai terbentuk ketika sebagian masyarakat, khususnya nelayan pemancing dan masyarakat yang merasa kurang memperoleh manfaat wisata, mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap sistem pengelolaan wisata. Ketidakpuasan tersebut tidak lagi disampaikan secara individual, tetapi mulai dibicarakan bersama dalam berbagai forum seperti rapat, musyawarah desa, sosialisasi, maupun pertemuan yang melibatkan pemerintah desa, BLUD, operator wisata, dan masyarakat.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang merasa kurang dilibatkan memiliki tuntutan yang relatif sama, yaitu memperoleh kesempatan yang lebih adil untuk terlibat dalam aktivitas wisata serta mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih merata. Kesamaan tuntutan tersebut menunjukkan adanya kesadaran kolektif mengenai posisi mereka dalam sistem pengelolaan wisata. Salah satu masyarakat menjelaskan bahwa persoalan utama yang mereka perjuangkan bukanlah penolakan terhadap wisata hiu paus, melainkan keinginan untuk memperoleh keterlibatan yang lebih adil dalam pengelolaan wisata.

Kesadaran kolektif tersebut semakin menguat ketika masyarakat mulai menilai bahwa manfaat wisata lebih banyak diterima oleh kelompok tertentu. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa operator wisata memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam

menentukan jalannya aktivitas wisata sehingga kesempatan masyarakat lain untuk ikut terlibat menjadi terbatas.

Selain melalui penyampaian keluhan dalam forum-forum resmi, terbentuknya kelompok kepentingan juga terlihat dari adanya tindakan kolektif yang dilakukan masyarakat dalam merespons kebijakan maupun persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan wisata. Salah satu peristiwa yang menunjukkan hal tersebut adalah penyegelan kantor BLUD yang dilakukan sebagai bentuk protes terhadap persoalan pemanfaatan ruang laut dan keberadaan nelayan luar yang melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah perairan Labuhan Jambu.

Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi sekadar menyampaikan keluhan secara individu, tetapi telah melakukan tindakan bersama untuk memperjuangkan kepentingan yang mereka anggap terancam. Dalam perspektif Dahrendorf, tindakan semacam ini menunjukkan bahwa konflik yang sebelumnya masih bersifat laten mulai berkembang menjadi konflik yang lebih nyata (*manifest conflict*). Selain itu, kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama juga memanfaatkan berbagai organisasi dan forum yang ada di desa sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi mereka. Berdasarkan hasil temuan lapangan, masyarakat menyampaikan keluhan dan tuntutan melalui kelompok nelayan, asosiasi pemilik bagang, Pokdarwis, Pokmaswas, pemerintah desa, maupun forum musyawarah yang melibatkan para pemangku kepentingan wisata.

Keluhan yang paling sering disampaikan berkaitan dengan ketidakmerataan pembagian tamu, dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan wisata, keterbatasan kesempatan masyarakat untuk terlibat, serta lambatnya tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi yang telah disampaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang merasa dirugikan telah memiliki tujuan dan kepentingan yang relatif sama dalam memperjuangkan perubahan tata kelola wisata yang dianggap lebih adil. Dengan demikian, terbentuknya kelompok kepentingan dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu menunjukkan adanya perkembangan dari kelompok semu menuju kelompok yang memiliki kesadaran kolektif yang lebih kuat. Kesadaran tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk tuntutan, penyampaian aspirasi, dan tindakan kolektif yang bertujuan untuk memperoleh akses, keterlibatan, serta distribusi manfaat yang lebih merata dalam pengelolaan wisata hiu paus. Dalam perspektif Dahrendorf, proses tersebut menunjukkan bahwa konflik sosial yang muncul dalam pengelolaan wisata hiu paus tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan distribusi otoritas dan akses terhadap sumber daya yang tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Ketimpangan Distribusi Manfaat

Keberadaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu memberikan berbagai implikasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa wisata hiu paus telah membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas wisata. Kehadiran wisatawan mendorong berkembangnya berbagai sektor usaha seperti jasa transportasi laut, penyewaan bagang, penginapan, perdagangan, pemandu wisata, hingga penyedia jasa kendaraan. Kondisi ini menunjukkan bahwa wisata hiu paus telah menjadi sumber pendapatan alternatif bagi sebagian masyarakat selain sektor perikanan yang sebelumnya menjadi mata pencaharian utama.

Salah satu kelompok yang merasakan manfaat ekonomi secara langsung adalah pemilik bagang, operator wisata, pemilik perahu, pemilik penginapan, serta pelaku usaha yang berhubungan dengan aktivitas wisata. Pendapatan yang diperoleh dari wisata dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bahkan beberapa masyarakat menyatakan

bahwa penghasilan dari sektor wisata jauh lebih besar dibandingkan hasil yang diperoleh dari pekerjaan sebelumnya hal ini membuktikan bahwa aktivitas wisata hiu paus telah membawa perubahan nyata terhadap kondisi melaut. Selain meningkatkan pendapatan, manfaat tersebut juga terlihat dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan keluarga, memperbaiki kondisi tempat tinggal, serta membiayai pendidikan anak.

Selain memberikan dampak ekonomi, wisata hiu paus juga memberikan implikasi sosial berupa peningkatan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai konservasi laut dan pengelolaan pariwisata. Interaksi masyarakat dengan wisatawan, peneliti, NGO konservasi, maupun pemerintah telah mendorong terbentuknya pemahaman baru bahwa hiu paus tidak hanya memiliki nilai ekologis, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan melalui kegiatan wisata yang berkelanjutan

Meskipun demikian, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa manfaat wisata hiu paus belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Desa Labuhan Jambu. Ketimpangan distribusi manfaat menjadi salah satu persoalan yang paling sering disampaikan oleh masyarakat. Sebagian masyarakat, terutama nelayan pemancing yang tidak lagi dilibatkan dalam aktivitas wisata, merasa bahwa keuntungan wisata hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki akses langsung terhadap pengelolaan wisata. Kondisi tersebut menimbulkan rasa kecewa, kecemburuan sosial, dan ketidakpuasan terhadap sistem pengelolaan yang berjalan saat ini.

Kekecewaan yang dirasakan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan tidak adanya kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan wisata, tetapi juga karena adanya kerugian ekonomi yang mereka alami akibat harapan yang tidak terwujud. Beberapa nelayan mengaku telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk menyesuaikan fasilitas mereka dengan kebutuhan wisata, namun pada akhirnya tetap tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat.

Hasil penelitian lapangan juga menunjukkan bahwa kelompok yang dianggap memperoleh manfaat paling besar dari wisata hiu paus adalah operator wisata. Hal ini karena operator memiliki posisi strategis dalam seluruh rangkaian aktivitas wisata, mulai dari menerima pemesanan wisatawan, mengatur perjalanan wisata, menyediakan transportasi, hingga menghubungkan wisatawan dengan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Posisi tersebut menyebabkan sebagian besar aliran pendapatan wisata berada pada kelompok operator.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh masyarakat yang menilai bahwa operator wisata tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa wisata, tetapi juga menjadi kelompok yang paling dominan dalam memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas wisata hiu paus.

Dalam perspektif teori konflik Dahrendorf, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kepentingan yang lahir dari posisi yang berbeda dalam struktur pengelolaan wisata. Kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan kelompok yang berada di luar struktur pengelolaan. Ketimpangan distribusi manfaat ini kemudian melahirkan kepentingan subjektif di kalangan masyarakat yang merasa dirugikan, yang ditunjukkan melalui berbagai bentuk keluhan, kritik, dan tuntutan terhadap sistem pengelolaan wisata yang dianggap belum adil.

Dengan demikian, wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu tidak hanya membawa dampak positif berupa peningkatan ekonomi dan pengetahuan masyarakat, tetapi juga memunculkan ketimpangan distribusi manfaat yang menjadi salah satu sumber utama konflik sosial. Perbedaan akses terhadap manfaat wisata menciptakan rasa kecemburuan sosial, ketidakpuasan, dan persaingan antar kelompok masyarakat, khususnya antara

kelompok yang terlibat langsung dalam pengelolaan wisata dengan kelompok yang merasa tidak memperoleh kesempatan yang sama. Temuan ini memperlihatkan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh wisata hiu paus belum sepenuhnya terdistribusi secara merata, sehingga menjadi faktor yang memperkuat dinamika konflik dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

Harapan Terhadap Keberlanjutan Wisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Labuhan Jambu mendukung keberlanjutan wisata hiu paus dan berharap wisata tersebut tetap berkembang di masa mendatang. Namun, masyarakat juga menilai bahwa masih terdapat berbagai aspek yang perlu diperbaiki agar pengelolaan wisata dapat berjalan lebih baik, adil, dan mampu meminimalkan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Berbagai rekomendasi yang disampaikan masyarakat umumnya berkaitan dengan tata kelola wisata, pemerataan manfaat, komunikasi antar pihak, peningkatan fasilitas, serta upaya menjaga keberlanjutan konservasi hiu paus. Salah satu aspek yang paling banyak disoroti masyarakat adalah perlunya perbaikan tata kelola wisata. Beberapa masyarakat menilai bahwa sistem pengelolaan yang berjalan saat ini masih belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Dominasi kelompok tertentu dalam pengelolaan wisata serta ketidakjelasan pembagian peran antar pihak dianggap menjadi faktor yang memicu munculnya konflik dan kecemburuan sosial. Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya aturan yang lebih tegas dan mekanisme pengelolaan yang lebih transparan agar seluruh pihak dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

Harapan serupa juga disampaikan oleh pemerintah desa yang menekankan pentingnya peran BLUD dalam menciptakan tata kelola wisata yang lebih baik. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan laut, BLUD diharapkan mampu menjalankan fungsi manajemen secara profesional sehingga berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dapat diminimalkan.

Selain persoalan tata kelola, masyarakat juga berharap adanya pemerataan keterlibatan dan distribusi manfaat dalam kegiatan wisata hiu paus. Harapan ini muncul karena sebagian masyarakat merasa bahwa manfaat wisata selama ini lebih banyak dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki akses langsung terhadap pengelolaan wisata. Masyarakat menginginkan agar kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas wisata dapat dibuka lebih luas sehingga nelayan, pelaku usaha kecil, dan masyarakat lainnya dapat ikut merasakan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh wisata hiu paus. Menurut sebagian masyarakat, keberhasilan wisata tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah wisatawan, tetapi juga dari sejauh mana manfaat wisata dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata. Ketika masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk terlibat, maka potensi konflik dan kecemburuan sosial dapat diminimalkan sehingga keberlanjutan wisata akan lebih mudah terjaga.

Masyarakat juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah desa, BLUD, operator wisata, NGO, dan masyarakat. Kurangnya komunikasi serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan masing-masing pihak dinilai sering menimbulkan kesalahpahaman dan perbedaan persepsi yang berujung pada konflik. Oleh karena itu, masyarakat berharap adanya forum komunikasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan agar setiap persoalan dapat dibahas serta diselesaikan secara bersama-sama.

Selain komunikasi dan tata kelola, masyarakat juga menilai bahwa pengembangan sarana dan prasarana wisata masih perlu ditingkatkan. Beberapa fasilitas pendukung seperti dermaga, penginapan, transportasi wisata, perlengkapan keselamatan, serta fasilitas bagi pelaku UMKM dinilai masih memerlukan perhatian agar mampu mendukung perkembangan wisata yang semakin meningkat. Masyarakat berharap pemerintah dan

pengelola wisata dapat memberikan dukungan yang lebih besar terhadap pengembangan fasilitas tersebut sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat. Tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, masyarakat juga menaruh perhatian terhadap keberlanjutan sosial dan konservasi lingkungan. Beberapa masyarakat mengungkapkan bahwa keberadaan wisatawan dari berbagai daerah maupun negara membawa perubahan sosial dan budaya yang perlu disikapi secara bijaksana oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berharap agar pengembangan wisata tetap memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya lokal yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Labuhan Jambu.

Selain itu, masyarakat juga menyadari bahwa keberlangsungan wisata hiu paus sangat bergantung pada kelestarian hiu paus dan ekosistem laut Teluk Saleh. Kesadaran tersebut mendorong harapan agar seluruh pihak tetap menjaga prinsip konservasi dalam setiap aktivitas wisata yang dilakukan. Penerapan aturan interaksi dengan hiu paus, pengawasan terhadap aktivitas wisata, serta edukasi kepada masyarakat dan wisatawan dianggap penting untuk menjaga keberlanjutan wisata dalam jangka panjang. Sebagian besar masyarakat juga berharap wisata hiu paus dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa. Mereka berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengambil peran sesuai kemampuan dan keahliannya masing-masing, baik sebagai pelaku usaha, pengrajin, penyedia jasa, maupun pelaku ekonomi kreatif yang mendukung kegiatan wisata.

Meskipun demikian, terdapat pula masyarakat yang menyampaikan harapan secara lebih kritis. Mereka menilai bahwa apabila ketimpangan manfaat dan keterlibatan masyarakat tidak segera diperbaiki, maka keberadaan wisata akan sulit diterima oleh seluruh masyarakat. Beberapa nelayan bahkan menyatakan bahwa keadilan dalam pengelolaan wisata merupakan syarat utama agar wisata hiu paus dapat terus memperoleh dukungan dari masyarakat lokal.

Dalam perspektif teori konflik Dahrendorf, berbagai rekomendasi dan harapan yang disampaikan masyarakat menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi ketimpangan yang muncul akibat perbedaan posisi dan akses dalam struktur pengelolaan wisata. Tuntutan mengenai tata kelola yang lebih adil, pemerataan manfaat, peningkatan komunikasi, dan keterlibatan masyarakat merupakan bentuk respons terhadap distribusi otoritas dan manfaat yang dianggap belum berjalan secara seimbang. Dengan demikian, harapan masyarakat terhadap keberlanjutan wisata hiu paus tidak hanya berorientasi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya sistem pengelolaan yang partisipatif, transparan, dan mampu memberikan manfaat secara lebih merata kepada seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tetap memiliki harapan besar terhadap masa depan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu. Namun, keberlanjutan wisata tersebut sangat bergantung pada kemampuan seluruh pihak dalam membangun tata kelola yang lebih adil, memperkuat komunikasi dan koordinasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan konservasi lingkungan. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, wisata hiu paus berpotensi menjadi sumber kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya laut yang menjadi daya tarik utama wisata di Desa Labuhan Jambu.

Eskalasi Keluhan dan Dinamika Komunikasi Masyarakat

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan wisata hiu paus umumnya disampaikan melalui forum musyawarah desa, rapat koordinasi, kegiatan sosialisasi, maupun melalui perwakilan kelompok yang ada di masyarakat. Dalam praktiknya, pemerintah desa menjadi pihak yang paling sering menerima pengaduan masyarakat karena dianggap memiliki posisi sebagai

penghubung antara masyarakat, pengelola wisata, dan pihak BLUD. Selain itu, terdapat beberapa kelompok atau asosiasi yang turut menjadi wadah penyampaian aspirasi masyarakat, seperti kelompok nelayan, asosiasi pemilik bagang, operator wisata, Pokdarwis, dan Pokmaswas. Melalui berbagai forum tersebut, masyarakat berupaya menyampaikan keluhan serta pandangan mereka mengenai pengelolaan wisata hiu paus yang sedang berlangsung. Meskipun ruang komunikasi telah tersedia, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai keluhan masyarakat masih terus muncul dan berkembang. Keluhan yang paling dominan berkaitan dengan ketidakmerataan pembagian tamu wisata dan distribusi manfaat ekonomi. Sebagian masyarakat menilai bahwa terdapat bagang maupun pelaku wisata tertentu yang lebih sering memperoleh tamu dibandingkan kelompok lainnya. Kondisi tersebut memunculkan persepsi adanya perlakuan yang tidak merata dan menimbulkan rasa iri serta kecemburuan sosial di kalangan masyarakat.

Selain persoalan pembagian tamu, keluhan juga banyak disampaikan oleh nelayan yang merasa keterlibatan mereka dalam aktivitas wisata semakin berkurang. Sebagian nelayan mengaku telah berusaha mengikuti berbagai persyaratan yang ditetapkan untuk mendukung kegiatan wisata, termasuk melakukan perbaikan dan pembesaran perahu. Namun demikian, upaya tersebut tidak selalu diikuti dengan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan wisata. Akibatnya, muncul rasa kecewa karena harapan memperoleh manfaat ekonomi dari wisata tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka alami.

Keluhan-keluhan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang berkembang dalam pengelolaan wisata hiu paus tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga menyangkut persoalan keadilan, kesempatan, dan pengakuan terhadap keberadaan kelompok masyarakat tertentu. Ketika sebagian masyarakat merasa tidak memperoleh akses yang sama terhadap manfaat wisata, maka muncul perasaan tersisih dari sistem pengelolaan yang sedang berjalan. Dalam kondisi demikian, keluhan yang awalnya bersifat individual mulai berkembang menjadi pembicaraan bersama di antara masyarakat yang memiliki pengalaman serupa. Hasil temuan lapangan juga menunjukkan bahwa eskalasi keluhan masyarakat dipengaruhi oleh kurang jelasnya tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi yang telah disampaikan. Beberapa masyarakat menyatakan bahwa keluhan masyarakat sebenarnya telah dibahas dalam berbagai forum pertemuan, namun realisasi penyelesaiannya sering kali belum terlihat secara nyata. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa bahwa aspirasi mereka hanya didengar tanpa adanya tindakan yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

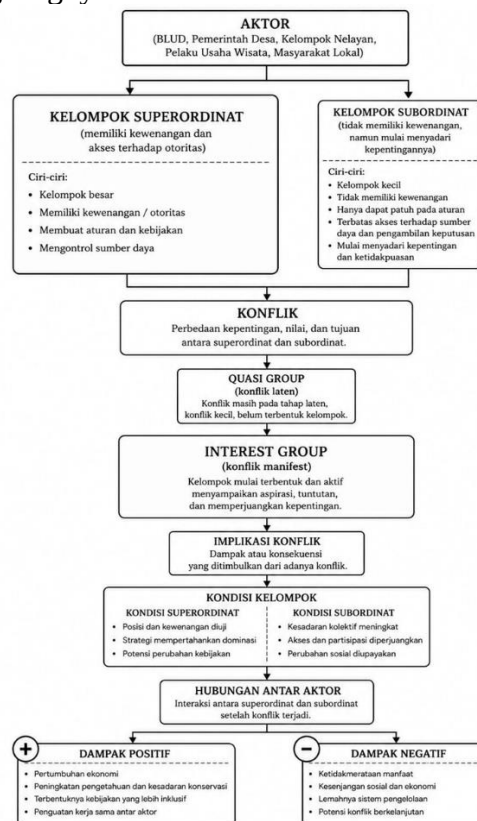
Kurangnya kepastian terhadap penyelesaian masalah kemudian memunculkan rasa kecewa dan menurunkan tingkat kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem pengelolaan wisata. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk menyampaikan kritik secara lebih terbuka kepada pemerintah desa, operator wisata, maupun BLUD. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketegangan yang muncul masih berada dalam bentuk perbedaan pendapat, keluhan, dan kritik sosial, serta belum berkembang menjadi konflik fisik yang bersifat terbuka. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang merasakan manfaat dari keberadaan wisata hiu paus, terutama pelaku UMKM, pemilik usaha, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam aktivitas wisata. Kelompok ini cenderung memandang wisata hiu paus sebagai peluang ekonomi yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun demikian, mereka juga mengakui bahwa masih terdapat berbagai persoalan dalam pengelolaan wisata yang perlu dibenahi agar manfaat wisata dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Dinamika komunikasi yang terjadi di tengah masyarakat memperlihatkan bahwa wisata hiu paus telah menciptakan ruang interaksi yang cukup intens antar berbagai aktor, baik masyarakat, pemerintah desa, operator wisata, maupun BLUD. Akan tetapi, perbedaan

kepentingan yang dimiliki masing-masing kelompok menyebabkan komunikasi yang terjalin tidak selalu berjalan secara efektif. Kurangnya pemahaman mengenai kewenangan masing-masing pihak, perbedaan persepsi terhadap aturan, serta ketidakpuasan terhadap distribusi manfaat sering kali menjadi sumber munculnya kesalahpahaman dan ketegangan sosial. Dalam perspektif teori konflik Dahrendorf, kondisi tersebut menunjukkan proses berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap kepentingan yang mereka miliki dalam struktur pengelolaan wisata. Keluhan-keluhan yang terus disampaikan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat mulai menyadari adanya ketimpangan akses terhadap manfaat dan keterlibatan dalam pengelolaan wisata. Kesadaran tersebut kemudian mendorong masyarakat untuk menyuarkan tuntutan, kritik, dan aspirasi melalui berbagai forum komunikasi yang tersedia. Dengan demikian, keluhan masyarakat tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk ketidakpuasan individu, tetapi juga sebagai manifestasi dari perbedaan kepentingan yang muncul akibat distribusi otoritas dan manfaat yang belum sepenuhnya merata.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa eskalasi keluhan dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu terutama dipicu oleh persoalan ketidakmerataan manfaat, keterlibatan masyarakat yang dianggap belum adil, dominasi kelompok tertentu dalam aktivitas wisata, serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat. Meskipun demikian, komunikasi melalui musyawarah, rapat, dan forum kelompok masih menjadi mekanisme utama yang digunakan masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi masih berada dalam tahap yang dapat dikendalikan melalui komunikasi dan negosiasi antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu.

Gambaran Berlangsungnya Konflik



Gambar 2 Gambaran Berlangsungnya Konflik
Sumber: Dimodifikasi oleh Penulis

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai konflik sosial dalam pengelolaan wisata hiu paus di Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Konflik sosial dalam pengelolaan wisata hiu paus berawal dari perubahan struktur pengelolaan wisata yang berkembang dari sistem berbasis masyarakat menuju pengelolaan yang lebih formal. Pada tahap awal, pengelolaan wisata melibatkan masyarakat lokal, pemerintah desa, dan lembaga konservasi dalam proses pengembangan wisata. Seiring berkembangnya wisata dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, terjadi perubahan distribusi otoritas dengan masuknya BLUD sebagai pengelola resmi kawasan wisata laut. Dalam praktiknya, operator wisata tetap memiliki pengaruh yang kuat dalam pengaturan aktivitas wisata di lapangan. Perubahan struktur pengelolaan tersebut menimbulkan perbedaan pandangan dan kepentingan terkait kewenangan, akses pengelolaan, serta pembagian manfaat wisata yang kemudian menjadi dasar munculnya konflik sosial.
2. Konflik dalam pengelolaan wisata hiu paus melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda, yaitu pemerintah desa, BLUD, lembaga konservasi, operator wisata, Pokdarwis, Pokmaswas, pemilik bagang, pemilik perahu, pelaku UMKM, dan masyarakat nelayan. Berdasarkan perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, terdapat perbedaan posisi antara kelompok yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan dengan kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap pengelolaan wisata. Perbedaan posisi tersebut melahirkan kepentingan yang berbeda di antara para aktor. Kepentingan tersebut kemudian berkembang menjadi keluhan dan ketidakpuasan yang pada awalnya bersifat individual, namun selanjutnya berkembang menjadi tuntutan yang disampaikan secara bersama oleh kelompok masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam pengelolaan wisata maupun dalam distribusi manfaat yang dihasilkan.
3. Konflik yang terjadi memberikan implikasi terhadap kondisi sosial masyarakat Desa Labuhan Jambu. Di satu sisi, keberadaan wisata hiu paus memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan masyarakat, terbukanya peluang usaha, serta bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai pariwisata dan konservasi laut. Akan tetapi, di sisi lain ditemukan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat wisata yang menyebabkan munculnya rasa kecewa, kecemburuan sosial, dan ketidakpuasan dari sebagian masyarakat yang merasa tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam kegiatan wisata. Konflik yang muncul umumnya masih berada pada tingkat konflik sosial sehari-hari berupa perbedaan pendapat, persaingan kepentingan, dan ketegangan komunikasi antar kelompok. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat tetap berharap wisata hiu paus dapat terus berkembang dengan sistem pengelolaan yang lebih adil, transparan, dan mampu memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat Desa Labuhan Jambu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Desa, BLUD, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata hiu paus perlu memperkuat sistem tata kelola wisata yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kejelasan mengenai pembagian peran, kewenangan, serta pengelolaan manfaat wisata perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat guna meminimalkan kesalahpahaman dan potensi konflik di kemudian hari.

2. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata perlu diperluas agar manfaat wisata tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Upaya pemerataan kesempatan dalam kegiatan wisata dapat dilakukan melalui pemberdayaan nelayan, pelaku UMKM, maupun masyarakat lain yang sela-ma ini belum memperoleh akses yang memadai terhadap aktivitas wisata.
3. Komunikasi dan koordinasi antar stakeholder perlu ditingkatkan melalui fo-rum musyawarah yang dilakukan secara berkala. Forum tersebut dapat men-jadi sarana penyampaian aspirasi, penyelesaian permasalahan, serta evaluasi bersama terhadap pengelolaan wisata hiu paus sehingga potensi konflik dapat diselesaikan secara lebih cepat dan terbuka.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai strategi penyelesaian konflik, tata kelola wisata berbasis masyarakat, serta model distribusi manfaat yang lebih berkeadilan dalam pengelolaan wisata pesisir sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata hiu paus yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2021). Konflik Politik Desa Perebutan Sumber Daya Ekonomi (Studi Kasus Konflik Masyarakat Desa Pulau Pandan Versus PLTA PT Kerinci Merangin Hidro di Kabupaten). 2(2), 107–121.
- Aini, A. (2024). Gap Penelitian: Definisi, Contoh, Jenis, dan Cara Menemukan. Glints. <https://glints.com/id/lowongan/research-gap-penelitian-adalah/>
- Angga Bagas Samudra. (2021). Negosiasi Antar Budaya.
- Aprillianto, C., Panjaitan, T. W. S., & Rolalisasi, A. (2024). Implementasi Pendekatan Arsitektur Ekologis Pada Ekowisata Dusun Bambu Bandung. ETNIK: Jurnal Ekonomi–Teknik, 3(1), 70–76.
- Aerif Yahya, M. P. R. I. (2021). Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
- Baihaqi, F., & Annida, S. B. (2024). The Social and Cultural Impact of Marine Tourism on Coastal Communities: A Qualitative Study at Tanjung Lesung Beach. 2(1), 75–82.
- Belitung, U. B. (2021). Bagaimana Strategi Masyarakat dalam Menjaga Kearifan Lokal Keraka dan Bagaimanakah Bentuk dari Kearifan Lokal Desa Batu Beriga, 1–18.
- Creswell, J. W. (2020). Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan (Edisi ke-3). Pustaka Pelajar.
- Eraku, S. S., Pambudi, M. R., & Kobi, W. (2023). Inovasi Berkelanjutan: Memperkuat Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Wisata Hiu Paus yang Berkelanjutan di Desa Batubarani. 2(1), 1–8.
- Fahrunnisa, F., Soetarto, E., & Purnaningsih, N. (2016). Konsistensi Akses Sumber Agraria di Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang, Kabupaten Sumbawa, NTB.
- Firdaus Yusrizal, A. Y. A. (2020). Dampak Sosial Budaya Pariwisata: Masyarakat Majemuk, Konflik dan Integrasi Sosial di Yogyakarta. 7(2), 92–105.
- Fitria, A. D., Cucu, A., Sianturi, K., Salwa, F., Manik, H. F., Khairani, K., Mahpuja, L., Lestari, N., Rahmawati, N., Sagala, S. S., Arika, R., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 1068–1078.
- Gatra, P. (2024). Ekowisata Berbasis Hiu Paus di Indonesia: Strategi Konservasi atau Ancaman Baru? 6(1), 95–107.
- Hariyadi, B. R., Rokhman, A., Rosyadi, S., Yamin, M., & Runtiko, A. G. (2024). The Role of Community-Based Tourism in Sustainable Tourism Village in Indonesia. Revista de Gestão Social e Ambiental (RGSA).
- Januarti, N. E. (2021). Strategi Pengembangan Lingkungan Sebagai Kawasan Desa Wisata di Sendangsari, Pajangan, Bantul, DIY. Jurnal Sosiologi Reflektif, 12(1), 71.
- Jayadi, K., & Abduh, A. (2021). Social Impact of Cultural Tourism in Indonesia: The Case of Tana

- Toraja. *International Journal of Cultural Heritage*.
- Jumiati, W. S., Udu, & Sumiman, I. I. (2023). Relasi Kuasa dalam Novel Tanah Bangsawan Karya Filiananur.
- Komang Jaka Fardian, I., Idrus, I. A., & T. (2021). Dampak Ekowisata Bahari dalam Perspektif Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan Pesisir. 3, 481–499.
- Kresnoadi. (2025). Faktor-Faktor Penyebab Konflik Sosial di Masyarakat. Ruang-guru.<https://www.ruangguru.com/blog/penyebab-konflik-sosial-di-masyarakat>
- Maulana, I. (2021). Konflik Sosial Masyarakat Transmigrasi dengan Masyarakat Lokal dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Riset dan Inovasi Pendidikan*, 1(2), 113–125.
- Masjhoer, J. M. (2021). Pengantar Wisata Bahari (E. Sugiarto, Ed.). Khitah Publishing.
- Masjhoer, J. M., & Mazaya, A. F. A. (2024). Wisata Bahari (N. S. Wahyuni, Ed.). Widina Media Utama.
- Novri Susan. (2021). Teori Konflik Kontemporer. Kencana.
- Putri, P. K. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan terhadap Perdamaian. *Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1).
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181.
- Ridwan, M., AM, S., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). The Importance of Application of Literature Review in Scientific Research. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42.
- Ristiawan, T., & Tiberghien, G. (2021). A Critical Assessment of Community-Based Tourism Practices in Nglanggeran Ecotourism Village, Indonesia. *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*.
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-5). Alfabeta.
- Superadmin. (2023). Faktor Penyebab Konflik Sosial dan Dampak yang Ditimbulkannya. Pijar Belajar. <https://www.pijarbelajar.id>
- Supriyanto, E. E. (2022). Blue Tourism: Treating Marine Ecosystems and Increasing. 16(16), 138–148.
- Suranto, M. (2021). Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM), 1–10.
- Suryani, D. (2021). Konflik dan Resolusi Konflik: Perbandingan di Sambas dan Sampit. 146.
- Susilo, R. K. D. (2021). 20 Tokoh Sosiologi Modern: Biografi Para Peletak Sosiologi Modern (Cetakan IV). Ar-Ruzz Media.
- Sistem, B. D. dan. (2025). Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulan Mei 2025. Kementerian Pariwisata.
- Sri Nurhidayati. (2022). Dampak Ekowisata Hiu Paus terhadap Perilaku Sosial Masyarakat Desa Labuhan Jambu Kecamatan Tarano. *Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan*, 5(2), 91–92.
- Statistik, D. (2024). Pedoman Pemanfaatan Data Statistik Wisatawan.
- Tim Yayasan Vitka. (2021). Mengenal Klasifikasi dan Jenis-Jenis Pariwisata. BTP–Batam Tourism Polytechnic.
- Widiawati, S. P., Damayanti, S. P., & H. M. D. (2025). Persepsi Wisatawan dalam Minat Berkunjung ke Destinasi Wisata Hiu Paus Teluk Saleh Sumbawa. 4(3), 961–966.
- Wijayanti, N., & Nurhidayati. (2024). Pengaruh Langsung Ekowisata Hiu Paus terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Sumbawa Indonesia. 4(2), 160–166.
- Wisnubroto, K. (2025). Geliat Sektor Pariwisata Pacu Pertumbuhan Ekonomi. Portal Informasi Indonesia.
- Zakarias, J. D. (2021). Dampak Pembangunan Pariwisata terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Lokal di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1), 1–15.